

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun - tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders/mitra kerja. sehingga kontribusi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang di prioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Badan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah. tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 15 (lima belas) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dan Renstra BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua

pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Pada tahun 2016, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan diukur melalui 4 (empat) sasaran strategis mencakup masing-masing bidang capaian beserta berbagai programnya.
3. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016, 15 (lima belas) indikator dengan 12 (dua belas) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 3 (tiga) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.
4. Secara umum pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 dapat dikategorikan berhasil.
5. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, yaitu :
  - 1) Masih rendahnya pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kurangnya komitmen dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
  - 2) Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah dalam proses perencanaan dan evaluasi.
  - 3) Belum optimalnya peranan instansi yang terkait dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sehingga masih banyak pelanggaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat.

- 4) Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara BPPKBPA dengan BKKBN
6. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dirumuskan saran-saran sebagai berikut :
  - 1) Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat dengan sosialisai tentang penyusunan program dan kegiatan yang berbasis responsif gender bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
  - 2) Optimalisasi pengumpulan data terpilah yang diperoleh dari berbagai institusi terkait secara rutin dan direkap (dianalisa) sebagai acuan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 3) Dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi masyarakat dikarenakan luasnya jangkauan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan laporan maka dilakukan sosialisasi berkenaan dengan masalah dimaksud kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik dengan harapan timbulnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan tindakan pelanggaran yang terjadi dilingkungannya kepada instansi atau lembaga yang berwenang;
  - 4) Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Keluarga Berencana di Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan koordinasi dan sinkronisasi program KB dengan BKKBN.

Sejumlah keberhasilan telah dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. Sementara itu beberapa kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang dijumpai menjadi tantangan yang harus disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak demi tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.